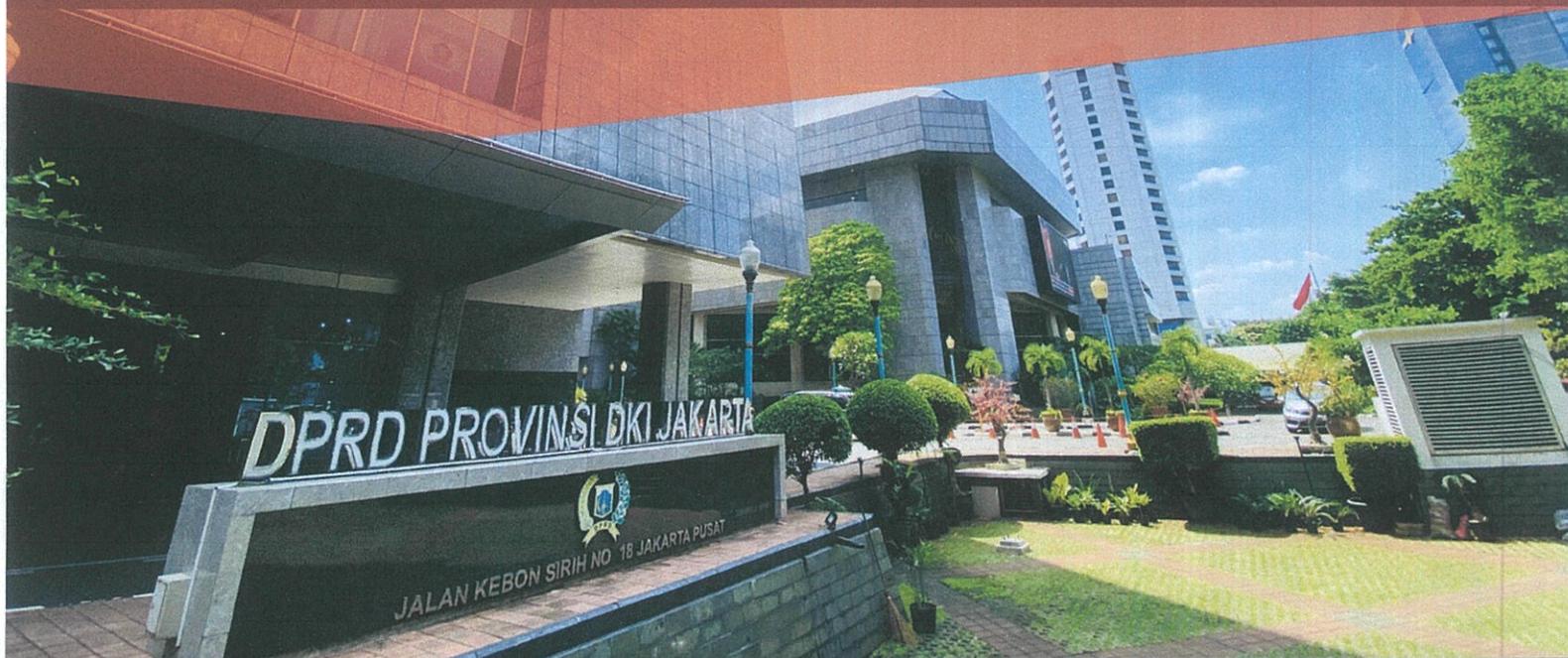




SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

RENJA TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI DKI JAKARTA



Jl. KEBON SIRIH NO 18,
GAMBIR, JAKARTA PUSAT



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kami Panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2022, dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 bertujuan menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan sebagai pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, adanya rekomendasi yang konstruktif terhadap identifikasi permasalahan, arah kebijakan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Semoga Ridho Allah SWT menyertai dalam pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Jakarta, Juni 2023

Pt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.



Augustinus, SE., MM
NIP 197908052008011010



IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)



IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas, wewenang dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan seluruh perangkat daerah wajib menyusun dokumen Perangkat Daerah yang terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja serta pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dan sejumlah Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 secara singkat memuat substansi sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Lalu menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



3. Bab III Tujuan dan Sasaran menguraikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi serta Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
4. Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah menguraikan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Pendanaan Perangkat Daerah yang terinci dalam Program dan Kegiatan.
5. Bab V Penutup.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.



DAFTAR ISI





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY).....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.....	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	30
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD	30
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)	34
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024	44
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	45
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD	46
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024	57
BAB V PENUTUP	71



DAFTAR TABEL





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD	8
Tabel 2. 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	32
Tabel 2. 3	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Sekretariat DPRD	36
Tabel 2. 4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	43
Tabel 4. 1	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	58

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan



1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal tersebut disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, serta penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
17. Surat Edaran Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 3/SE/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
18. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 63/SE/2022 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Adanya kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju;
3. Menjaga keselarasan antara program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Sebagai pedoman bagi Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024;
5. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi DKI Jakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD, keterkaitan antara Renja dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD, serta proses penyusunan Renja.

BAB 2 : Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 (n-1) dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2022, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB 3 : Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD.

BAB 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2024

Bab ini memuat Rincian Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikatif Sekretariat DPRD Tahun 2024.

BAB 5 : Penutup

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022



Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD pada Tahun 2023. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan, isu-isu strategis, program, kegiatan, sub kegiatan Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 serta realisasi target sasaran Renstra Sekretariat DPRD pada Tahun 2023.

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) program utama, dan 1 (satu) program urusan Pemerintah Daerah yang diampu oleh Sekretariat DPRD yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Adapun Realisasi capaian masing-masing Program tersebut tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta (sampai dengan Tahun 2023)

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
	A.4	Urusan Pemerintahan Daerah									
	A.4.02	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah									
Sekretariat DPRD	A.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD	4	5	5	100%	4	4	100%	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Indeks kepuasan Layanan Perundangan-undangan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		1	1	100%	1	1		
			Nilai Kepuasan layanan terhadap pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		4	4	100%	4	4		



Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan layanan terhadap Pimpinan dan Anggota Bapemperda		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan Kunjungan Kerja Bapemperda		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Indeks Kepuasan Layanan Persidangan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan KUA PPAS APBD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		2	2	100%	2	2		
			Jumlah MOU KUA-PPAS		1	1	100%	1	1		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Banggar		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Pembahasan KUA dan PPAS		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		3	3	100%	3	3		
			Jumlah MOU KUA dan perubahan PPAS		1	1	100%	1	1		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Banggar		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		1	1	100%	1	1		
			Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD yang disusun tepat waktu		1	1	100%	1	1		
			Nilai kepuasan terhadap layanan pembahasan APBD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Banggar		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		1	1	100%	1	1		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD yang disusun tepat waktu		1	1	100%	1	1		
			Nilai kepuasan terhadap layanan pembahasan APBD Perubahan		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Banggar		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Pembahasan P2APBD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		2	2	100%	2	2		
			Jumlah Dokumen Pembahasan P2APBD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		1	1	100%	1	1		
			Nilai kepuasan terhadap layanan Pembahasan laporan Semester		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Banggar								
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Pembahasan LKPJ yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		2	2	100%	2	2		
			Jumlah Dokumen Pembahasan LKPJ APBD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		1	1	100%	1	1		
			Nilai kepuasan terhadap layanan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Banggar		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Layanan Persidangan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Rapat Kerja dan Peninjauan Komisi A yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		15	15	100%	15	15		



Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi A yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi A		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Komisi A		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Rapat Kerja dan Peninjauan Komisi D yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		15	15	100%	15	15		
			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi D yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi D		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Komisi D		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan rapat kerja dan Peninjauan Komisi E yang disusun tepat pada		15	15	100%	15	15		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			waktunya selama 1 tahun								
			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi E yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi E		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Komisi E		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Rapat Kerja dan Peninjauan Komisi B yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		15	15	100%	15	15		
			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi B yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi B		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Komisi B		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Rapat Kerja dan Peninjauan Komisi C yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		15	15	100%	15	15		
			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi C yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi C		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Kunjungan Kerja Komisi C		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sarana dan Prasarana		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan		6	6	100%	6	6		
			Nilai Kepuasan Layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Nilai Kepuasan terhadap layanan Publikasi Kegiatan DPRD		4	4	100%	4	4		
			Jumlah Laporan pelaksanaan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		106	106	100%	106	106		
			Nilai Kepuasan terhadap Pengelolaan Digital Signage DPRD Provinsi DKI Jakarta		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan Terhadap Pencetakan kalender dinding dan kalender duduk DPRD Provinsi DKI Jakarta		4	4	100%	4	4		
			Nilai kepuasan terhadap Pengelolaan Sistem E Notulen		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Pengelolaan Website DPRD Provinsi DKI Jakarta		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Nilai Kepuasan terhadap Pembuatan, Pencetakan dan Pengiriman Majalah Legislatif Jaya		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Pencetakan buku agenda dan buku saku DPRD Provinsi DKI Jakarta		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Penyediaan Perlengkapan Dokumentasi		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Digitalisasi dokumen/arsip		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kajian Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		360	360	100%	360	360		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Laporan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		108	108	100%	108	108		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah yang dibahas tepat pada waktunya		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Persidangan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Nilai Kepuasan Layanan terhadap kunjungan kerja luar negeri		4	4	100%	4	4		
			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dalam daerah Sekretariat DPRD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		6	6	100%	6	6		
			Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Pimpinan Dewan yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		6	6	100%	6	6		



Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Jumlah kompilasi Laporan pelaksanaan kunjungan kerja luar negeri Pimpinan dan Anggota Dewan selama 1 tahun		1	1	100%	1	1		
			Nilai Kepuasan Layanan terhadap kunjungan kerja Sekretariat DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan Layanan terhadap kunjungan kerja Pimpinan Dewan		4	4	100%	4	4		
			Jumlah Aspirasi Masyarakat yang terserap		120	120	100%	120	120		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Kompilasi pelaksanaan Reses yg disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		3	3	100%	3	3		
			Nilai kepuasan layanan pelaksanaan reses Anggota Dewan		4	4	100%	4	4		
			Jumlah aplikasi sistem e reses yang dikelola		1	1	100%	1	1		
			Jumlah laporan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		300	300	100%	300	300		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Persidangan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan pelaksanaan Rapat Badan Kehormatan yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Persidangan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Kunjungan Kerja Panitia Khusus		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD		4	4	100%	4	4		
			Jumlah Laporan pembahasan Rapat Panitia Khusus dan Kepanitian Lainnya yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Jumlah Laporan Rapat Pimpinan Dewan yang disusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	100%	4	4	100%	
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji atau Tunjangan ASN sesuai ketentuan yang berlaku		100	100	100%	100	100		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perencanaan, dan kinerja yang tersusun tepat pada waktunya selama 1 tahun		2	2	100%	2	2		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Nilai Kepuasan terhadap pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Kepuasan terhadap Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kebutuhan Kantor		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Bahan Bacaan		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai kepuasan terhadap layanan fasilitasi BBM KDO/KDO Khusus		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Makanan dan		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Minuman								
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai kepuasan pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta HUT Kota Jakarta		4	4	100%	4	4		
			Jumlah pelaksanaan rapat HUT DKI Jakarta di gedung DPRD		1	1	100%	1	1		
			Nilai kepuasan pelaksanaan rapat paripurna		4	4	100%	4	4		
			Jumlah pelaksanaan Paripurna di gedung DPRD		12	12	100%	12	12		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai kepuasan terhadap layanan pemeliharaan KDO/KDO Khusus		4	4	100%	4	4		
			Nilai kepuasan terhadap penyediaan jasa pajak dan perizinan KDO/KDO Khusus		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan Pengamanan Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai kepuasan terhadap layanan kerohanian		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Pemeliharaan dan Pengadaan Alkes Poliklinik DPRD		4	4	100%	4	4		
			Jumlah Laporan Kinerja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan		12	12	100%	12	12		
			Jumlah Laporan Kinerja Petugas Keamanan setiap bulan selama 1 tahun		12	12	100%	12	12		
			Jumlah Laporan Kinerja Petugas TNI/Polri yang ditugaskan sebagai BKO di gedung Sekretariat		12	12	100%	12	12		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			DPRD								
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan terhadap layanan pemeliharaan KDO/KDO Khusus		4	4	100%	4	4		
			Nilai kepuasan terhadap penyediaan jasa pajak dan perizinan KDO/KDO Khusus		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Ketua DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Pemeliharaan Sipil Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Jasa Fumigasi Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Jumlah laporan penyediaan jasa perencanaan pemeliharaan gedung yang disusun tepat pada waktunya		1	1	100%	1	1		
			Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kebersihan Kantor		12	12	100%	12	12		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan Jaringan Internet Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan AC Sentral Chiler York Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Nilai Kepuasan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan CCTV Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan Lift Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan cooling tower Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai kepuasan terhadap layananan Pemeliharaan Travo, Panel Listrik dan Genset Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan Pompa Air Bersih, STP dan Plumbing Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai Kepuasan terhadap layanan Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		



Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Nilai Kepuasan Pemeliharaan Instalasi Sprinkel, Smoke Detector, Hydrant Dan Fire Alarm System Gedung DPRD		4	4	100%	4	4		
			Nilai kepuasan terhadap layanan Pemeliharaan Sound System Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pembayaran Gaji atau Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku		100	100	100%	100	100		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Kepuasan terhadap layanan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		4	4	100%	4	4		
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD		4	4	100%	4	4		

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Realisasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Nilai Kepuasan terhadap layanan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan Pimpinan Dewan dan Perlengkapan Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan		4	4	100%	4	4		

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator pada 2 (dua) program yang dilaksanakan, berada dalam kategori sangat baik dan sesuai dengan target. Diharapkan pada Tahun Anggaran 2024 realisasi target indikator Program tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, sebagaimana evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang di rencanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
- Koordinasi yang baik antar unit kerja di Sekretariat DPRD serta kepatuhan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Rencana Strategis				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4	4	4	4	4	-	4	4	
2	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	-	-	4	4	4	4	4	-	4	4	

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 (dua) Indikator kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan Target pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dengan nilai indeks 4, yaitu : Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD. Realisasi capaian target pada 2 (dua) indikator tersebut mencapai nilai indeks 4 (100%) atau sesuai dengan target.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan peninjauan terhadap peluang, tantangan, permasalahan dan hambatan-hambatan yang dialami oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta prediksi terhadap kondisi yang

akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Berikut ini isu-isu strategis yang dapat berpengaruh terhadap kualitas dan kinerja layanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu:

a. Modernisasi Parlemen

Memasuki era digital, kehidupan berdemokrasi di Indonesia sebagaimana juga terjadi di negara lain di dunia, dihadapkan dengan tantangan dan dinamika baru. Sebelumnya, interaksi antara Anggota DPRD dengan masyarakat secara langsung biasanya hanya muncul pada masa Pemilu dalam proses pencarian legitimasi Anggota DPRD dan kegiatan Reses dalam rangka menyerap aspirasi dan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.

Saat ini, dengan hadirnya teknologi informasi serta berbagai jaringan media sosial, membuat arus informasi beredar dengan begitu cepat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi sekaligus langsung memberi respon baik positif atau pun negatif. Kondisi ini telah mendorong DPRD Provinsi DKI Jakarta bertransformasi menjadi Parlemen Modern. Melalui parlemen modern, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Anggota DPRD terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi.

Keberadaan parlemen modern di Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi suatu kebutuhan dan perlu direspons oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Konsep parlemen modern sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi DPRD. Konsep ini bertujuan agar DPRD dapat menjadi lembaga perwakilan yang modern serta dapat berkinerja lebih baik melalui visi transparansi dan peningkatan partisipasi publik. Sehingga DPRD pun menjadi lebih mudah dalam menjalankan fungsi representasinya.

b. Ibu Kota Nusantara / Pemindahan Ibukota Negara

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan sudah bukan wacana lagi. Implikasinya, berkaitan dengan peran sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta sudah tidak memiliki lagi kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan Perwakilan Negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Namun demikian, pemindahan Ibu Kota ini dapat menjadi sarana bagi Jakarta untuk mencapai dua target dasar. *Pertama*, menguraikan

permasalahan-permasalahan kota yang selama ini menjadi ancaman tersendiri bagi Jakarta, seperti: kepadatan penduduk yang berdampak pada kemacetan; tingginya tingkat polusi udara dan rendahnya ketersediaan air bersih; keberadaan pemukiman kumuh; dan lain-lain. *Kedua*, kesempatan bagi Jakarta untuk meningkatkan status dari ibu kota yang cenderung bersifat lokal menjadi kota global dengan semangat kosmopolitan. Harapannya tentu saja untuk menjadikan Jakarta lebih baik yang nantinya akan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c. Politik yang Dinamis

DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga politik, terdiri dari 106 (seratus enam) orang Anggota yang masing-masing anggota mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu-isu tertentu sesuai karakteristik Daerah Pemilihan (DAPIL) masing-masing, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan terjebak pada polarisasi kepentingan politik tertentu. Polarisasi kepentingan bukan saja dapat berdampak pada capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan dan layanan, tetapi pada lembaga DPRD secara keseluruhan.

d. Krisis Citra DPRD di Mata Publik

DPRD Provinsi DKI Jakarta mengalami krisis citra dan kepercayaan masyarakat. Berbagai kritik, kecaman dan keluhan dialamatkan kepadanya oleh berbagai kalangan, utamanya dari para buruh, generasi muda dan para mahasiswa, para cendekiawan/intelektual dan masyarakat. Namun demikian dengan adanya berbagai kritik, kecaman maupun stigma negatif terhadap DPRD, semuanya dapat diupayakan untuk diminimalisir melalui strategi komunikasi efektif dari para Anggota DPRD maupun oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

e. Adanya Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih baik telah menjadi tuntutan masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, Sebagai Lembaga publik, DPRD dan Sekretariat DPRD harus dapat menyelenggarakan fungsi parlemen dan pemerintahan yang terbuka, salah satunya melalui pemanfaatan/penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Perkembangan Teknologi Informasi dalam Kanal Demokrasi

Dalam kanal demokrasi, perkembangan teknologi informasi telah mendorong terciptanya masyarakat yang lebih melek informasi, sadar akan hak-haknya dan kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah menuntut peningkatan interaksi publik secara rutin dan efisien kepada para anggota DPRD. Publik ingin menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi bahkan berpartisipasi dalam proses legislasi, penganggaran maupun pengawasan secara aktif, efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu yang esensial sebagai sarana dalam mendukung kerja-kerja DPRD untuk lebih representatif, aspiratif, transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun serta mendukung terciptanya tatanan kehidupan yang lebih demokratis.

g. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun politik berkaitan dengan pelaksanaan kontestasi politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih oleh Masyarakat/Rakyat secara serentak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memfasilitasi pelayanan maupun, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi para Anggota DPRD yang terpilih, berupa penataan ruangan (Anggota, Komisi, Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD) pengadaan pakaian dinas dan atributnya, penyediaan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, penyediaan rumah dinas bagi Ketua DPRD, dan lain-lain.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	334.815.439.657	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	331.598.554.270	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	305.528.591	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	189.651.528	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	262.877.063	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	147.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	42.651.528	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	42.651.528	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	53.763.416.866	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	53.763.416.866	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	53.251.752.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	53.251.752.200	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	22.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	22.200.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	489.464.666	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	489.464.666	



No	Rancangan Awal RKP					Rancangan Akhir RKP					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	49.383.900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	49.383.900	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	49.383.900	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	49.383.900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	1.116.558.546	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	148.800.606	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKI Jakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1.116.558.546	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKI Jakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	148.800.606	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	29.775.639.308	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	29.465.721.816	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	637.352.565	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	637.352.565	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4.887.928.446	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4.552.363.993	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	472.674.597	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	472.674.597	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4.035.058.651	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4.035.148.128	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1.569.586.417	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1.569.586.417	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13	118.973.574	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13	144.531.058	
	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1.203.090.900	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1.203.090.900	



No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	83.471.600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	83.471.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	16.767.502.558	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	16.767.502.558	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran Yang Efisien	4	11.995.416.632	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran Yang Efisien	4	9.469.958.729	
	Pengadaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1.013.384.046	Pengadaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1.013.384.046	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	7.495.500.386	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	8.019.878.483	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	3.486.532.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	436.696.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	46.241.539.478	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	46.179.618.825	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	423.109.662	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	423.109.662	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8.508.821.420	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8.446.688.745	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	956.029.680	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	956.029.680	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	36.353.578.716	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	36.353.790.738	



No	Rancangan Awal RKP					Rancangan Akhir RKP					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	16.815.415.025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	17.106.569.717	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	1.569.919.068	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	1.572.266.293	
	Pemeliharaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	193.740.143	Pemeliharaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	193.740.143	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	771	894.405.211	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	771	894.410.199	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	5.595.096.746	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	5.883.742.020	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	7.121.498.396	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	7.121.556.981	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	400	1.440.755.461	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	400	1.440.854.081	
	Fasilitasi Keprotokolan	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan	4	2.344.414.531	Fasilitasi Keprotokolan	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan	4	2.817.305.503	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	16	2.344.414.531	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	16	2.817.305.503	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4	168.783.570.020	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4	168.783.570.020	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	106	165.220.544.200	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	106	165.220.544.200	



No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1	1.879.631.820	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1	1.879.631.820	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	106	1.683.394.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	106	1.683.394.000	
	Layanan Administrasi DPRD	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	4	3.624.556.760	Layanan Administrasi DPRD	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	4	3.624.556.760	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	3.624.556.760	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	3.624.556.760	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	4	293.924.813.322	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	4	370.635.956.300	
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4	1.033.696.480	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4	1.056.225.184	
			Jumlah Laporan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1				Jumlah Laporan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	634.770.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	634.830.000	
	Pembahasan Rancangan Perda	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1	128.268.480	Pembahasan Rancangan Perda	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1	135.737.184	
	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	252.000.000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	252.000.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	18.658.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	33.658.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	4	357.629.700	Pembahasan Kebijakan Anggaran	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	4	5.699.737.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1				Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1		
	Pembahasan KUA dan PPAS	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	7.215.000	Pembahasan KUA dan PPAS	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	7.215.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	7.215.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	7.215.000	
	Pembahasan APBD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	13	315.000.000	Pembahasan APBD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	13	5.674.485.000	
	Pembahasan Perubahan APBD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	24.592.200	Pembahasan Perubahan APBD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	7.215.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	3.607.500	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	3.607.500	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4	2.478.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4	9.923.940.000	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1				Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	495.600.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	1.925.010.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	495.600.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	2.022.840.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	495.600.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	1.875.570.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	12	495.600.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	12	1.925.010.000	



No	Rancangan Awal RKP					Rancangan Akhir RKP					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pemerintahan Bidang Perekonomian					Pemerintahan Bidang Perekonomian			
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	495.600.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	2.175.510.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	4	183.849.495.908	Peningkatan Kapasitas DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	4	180.075.862.293	
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	1				Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	1		
	Orientasi DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	777.380.000	Orientasi DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	777.380.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	12.697.174.800	Pendalaman Tugas DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6.803.606.400	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	35	164.230.021.108	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	35	165.978.309.357	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	DKI Jakarta	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	4.636.060.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	DKI Jakarta	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	4.595.500.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	DKI Jakarta	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	1.359.930.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	DKI Jakarta	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	1.358.500.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	148.930.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	562.566.536	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4	100.158.113.640	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4	100.867.906.140	
			Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1				Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1		
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	3.875.244.900	Kunjungan Kerja dalam Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	4.465.827.060	



No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan Reses	DKI Jakarta	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	106	96.282.868.740	Pelaksanaan Reses	DKI Jakarta	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	106	96.402.079.080	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4	25.974.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4	306.534.000	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1				Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1		
	Pengawasan Kode Etik DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12	25.974.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12	306.534.000	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah	4	1.659.762.506	Pembahasan Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah	4	3.497.710.496	
			Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	1				Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	1		
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	252.200.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	1.671.232.400	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	1.407.562.506	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	1.826.478.096	
	Fasilitasi Tugas DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	4	4.362.141.088	Fasilitasi Tugas DPRD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	4	69.208.040.687	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1				Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4	1.693.848.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4	55.538.831.879	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24	210.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24	4.760.730.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	2.407.673.308	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	3.782.491.308	



No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4	50.619.780	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4	5.125.987.500	

Pada bulan Februari tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyusun anggaran untuk perencanaan anggaran tahun 2024. Penyusunan anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan anggaran masing-masing Bagian dan Sub Bagian. Namun proses penyusunan anggaran ini masih sebatas anggaran proyeksi dikarenakan kami sebagai fasilitator untuk memfasilitasi dan melayani kebutuhan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan belum mengetahui secara detail kebutuhan untuk anggaran yang akan datang, selain itu ditahun ini ada perubahan SOTK pada organisasi Sekretariat DPRD yang mana perubahan SOTK ini mempengaruhi kami dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2024. Maka dari itu proses penyusunan anggaran akhir tahun 2024 pasti akan mengalami perubahan tambah kurang dalam proses penyusunan anggaran.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak mengusulkan Program dan Kegiatan yang menyangkut mengenai Pelayanan Dasar kepada Masyarakat. Karena sesuai dengan Visi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. Sehingga usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, hanya dikhususkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024



Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD, Program dan Kegiatan

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam masa penyusunan Rancangan Teknokrat RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Tema ini mengarah pada arah RPJMN tahap terakhir yaitu tahap keempat yang menyatakan **“Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur Melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian Yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah Yang Didukung oleh SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”**.

Dalam perwujudan Indonesia pada Tahun 2024, maka dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia
 - a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Pembangunan Ekonomi
 - a. Pangan dan Pertanian
 - b. Energi, Mineral dan Pertambangan
 - c. Kelautan dan Kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi Kreatif dan Digital
 - f. Industri Manufaktur
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan
5. Pembangunan Kewilayahan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2024 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penekanan di dalam RKP 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, telah ditetapkan Tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yaitu :

“Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Untuk Indonesia”

Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tersebut memenuhi *Money Follow Priority Programs*, memenuhi agenda Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, dan mengakomodir aspirasi masyarakat semaksimal mungkin dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Misi dan program unggulan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta DKI Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menumbuhkan kembangkan kemampuannya.

Birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur sipil negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur sipil negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel hanya akan tercapai manakala didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Eksekutif dan Legislatif dalam struktur pemerintahan, selalu bersama dalam kemitraan dan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua lembaga tersebut bertugas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terencana dan sistematis dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka fungsi penyelenggaraan pemerintahan diawali dari rakyat yang di representasikan oleh anggota DPRD. Oleh sebab itu keduanya harus saling sinergi antara Legislatif dan Eksekutif demi mewujudkan Pemerintahan Daerah yang demokratis.

Peran Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka dalam mensukseskan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta untuk 4 (empat) tahun kedepan, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta berupaya mewujudkan pelayanan yang optimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 demi **Tujuan** yang lebih besar yaitu sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan Renstra 2023-2026 dan Renja
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tujuan Renstra 2023-2026	Indikator	Tujuan Renja 2024	Indikator
Penguatan Kapasitas Legislatif dalam Meneruskan Aspirasi Masyarakat	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi	Penguatan Kapasitas Legislatif dalam Meneruskan Aspirasi Masyarakat	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi

Lebih lanjut, guna mewujudkan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, maka Sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Sasaran Renstra 2023-2026 dan Renja
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Sasaran Renstra 2023-2026	Indikator	Sasaran Renja 2024	Indikator
Peningkatan Efektifitas Layanan dan Fasilitasi Lembaga Legislatif	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi	Peningkatan Efektifitas Layanan dan fasilitasi Lembaga Legislatif	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD

A. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi ini tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun setiap tahun. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LKIP Sekretariat DPRD sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2017-2022. Selanjutnya untuk tahun 2024 penetapan indikator kinerja berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam Periode Renstra 2023-2026. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan tertuang di dalam LKIP menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tercermin dalam indikator kinerja

dalam empat tahun terakhir mencapai 100% yang didukung oleh pencapaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat dua program yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD, yaitu : 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kinerja kedua program tersebut dalam empat tahun terakhir telah mencapai 100%. Sedangkan kualitas penyerapan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai Sasaran Strategis dan pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah dikelola dengan baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya.

Keberhasilan pencapaian kinerja baik dari indikator kinerja dan anggaran menunjukkan pengembangan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi berbagai kendala untuk capaian kinerja selanjutnya, yakni kualitas dan kuantitas SDM aparatur.

Secara kualitas, kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta masih perlu mengimbangi dengan kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas lingkungan eksternal. Dari sisi kuantitas, pelaksanaan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masih perlu diimbangi dengan jumlah SDM yang tepat baik ASN maupun Non ASN, sehingga SDM yang ada dapat bekerja tanpa melampaui jam kerja yang telah ditentukan.

a) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipengaruhi faktor-faktor lingkungan strategis baik makro maupun mikro yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika yang kompleks dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada:

1. Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik; dan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada:

1. Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik; dan
2. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Eksekutif dan DPRD selaku Lembaga Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap kegiatan DPRD serta pelayanan publik ke depan.

Peninjauan terhadap peluang dan tantangan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Dari peninjauan ini maka akan terlihat kompleksitas dan dinamika kondisi lingkungan strategis yang akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berimplikasi terhadap profesionalisme aparatur, modernisasi sarana dan prasarana dan efisiensi proses bisnis (tata laksana) dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan.

b) Peluang

Beberapa peluang yang teridentifikasi serta dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya sebagai berikut:

1. Pola komunikasi serta kemitraan yang telah terjalin dengan baik antara DPRD dengan konstituen serta organisasi kemasyarakatan baik melalui kegiatan *hearing* (dengar pendapat), rapat-rapat dan kunjungan rutin;

4. Kemitraan strategis dengan komunitas media dan kelompok kepentingan serta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk sosialisasi program;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang ditunjang oleh kemampuan APBD yang terus meningkat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
6. Posisi kantor Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berada di Ibukota Negara, memudahkan untuk melakukan komunikasi atau interaksi secara langsung ke Pemerintah Pusat, sehingga sinergisitas dapat terbangun terutama dalam hal penyusunan Peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
7. DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari kelembagaan demokrasi di Indonesia, keberadaannya telah menjadi perhatian banyak pihak dan menjadi barometer kualitas penerapan dan pengembangan demokrasi di daerah. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penunjang layanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD memiliki peluang dan membuka ruang untuk bekerjasama dengan berbagai pihak (Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah) baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ruang lingkup kerjasama di maksud diantaranya adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM serta tata kelola Pemerintahan.

Dengan memperhatikan peluang yang telah teridentifikasi di atas, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan adaptasi baik secara kelembagaan maupun aparatur birokrasi. Langkah-langkah menuju perubahan perlu disusun dan dikembangkan, sehingga profesionalisme Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berperan dalam memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dapat terbangun. Implikasinya, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mampu merespons berbagai tuntutan perubahan dan tuntutan terhadap praktik pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

c) Tantangan

Peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pemberi layanan kepada para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan rakyat sangat strategis. Khususnya dalam penjangkaran aspirasi dan upaya-upaya pengawasan serta pengawalan pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta apabila mampu memberikan pelayanan positif serta memberikan pelayanan yang profesional kepada seluruh *stakeholder* utamanya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis, baik secara langsung maupun melalui kanal *website* yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Meningkatnya volume kegiatan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
3. Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
4. Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik
5. Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik yang berimplikasi terhadap volume kegiatan pelayanan Sekretariat DPRD;
6. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Seringnya terjadi perubahan kebijakan dan Peraturan Perundangan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pelaksanaan Otonomi Daerah.
8. Melaksanakan pelayanan dan dukungan yang profesional terhadap pelaksanaan fungsi dan alat kelengkapan DPRD.
9. Perlunya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang Teknologi Informasi untuk membantu peningkatan kinerja layanan dan dukungan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga kinerja pelaksanaannya dapat dihasilkan secara optimal;
10. Semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan publik terhadap kinerja DPRD dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan dari DPRD

merupakan peluang bagi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhinya.

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan yang dihadapi, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya, baik kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD Provinsi DKI Jakarta, maupun kepada seluruh *stakeholder* terkait, khususnya Warga DKI Jakarta.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat beberapa penyesuaian baik pada nomenklatur kegiatan, penambahan struktur Sub-Kegiatan, penggunaan kode rekening beserta kodefikasinya.

Mengacu pada penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, para Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya, struktur jenis belanja juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tersebut dimana tidak ada kategori Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL), namun hanya ada Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan).

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 19 (Sembilan belas) Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Fasilitasi Keprotokolan;
10. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
11. Layanan Administrasi DPRD;
12. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
13. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
14. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
15. Peningkatan Kapasitas DPRD;
16. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
17. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
18. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
19. Fasilitasi Tugas DPRD.

Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) dan telah diinput kedalam Sistem *Smart Planning Budgeting* sebesar Rp 628.740.252.979,- (*Enam ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/SE/2023 tanggal 8 Juni 2023 hal : Penyampaian Proyeksi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, Rencana Belanja, dan Pengeluaran Pembiayaan, Serta Penyempurnaan Pagu Indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, telah ditetapkan besaran Pagu Indikatif Rancangan Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.702.234.510.570,- (*Tujuh ratus dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp. 218.472.296.400,- (*Dua ratus delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*);



- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 471.807.150.489,- (*Empat ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah*);
- c. Belanja Modal Rp. 11.955.063.681,- (*Sebelas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*).

Terjadinya selisih anggaran pada penginputan ke dalam Sistem *Smart Planning Budgeting* sebesar Rp. 174.919,- (*Seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan belas rupiah*), hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat beberapa komponen yang belum tersedia dan sedang dalam proses pengusulan komponen.



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024



Rincian Program, Kegiatan, dan Anggaran
Indikatif Sekretariat DPRD Tahun 2024

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) Program, 19 (Sembilan belas) Kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.

Berikut adalah Tabel kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 :

Tabel 4.1
Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renja
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Fasilitasi Keprotokolan 10. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 11. Layanan Administrasi DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 14. Penyediaan Bahan/Material 15. Fasilitasi Kunjungan Tamu 16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17. Pengadaan Mebel 18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25. Pemeliharaan Mebel 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 31. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 32. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 33. Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD 34. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah 8. Fasilitasi Tugas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Perda 3. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 4. Penyusunan Tata Tertib DPRD 5. Pembahasan KUA dan PPAS 6. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 7. Pembahasan APBD 8. Pembahasan Perubahan APBD 9. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 10. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 11. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 13. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			14. Pengawasan Penggunaan Anggaran 15. Orientasi DPRD 16. Pendalaman Tugas DPRD 17. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 18. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 19. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 20. Penyusunan Program Kerja DPRD 21. Kunjungan Kerja dalam Daerah 22. Pelaksanaan Reses 23. Pengawasan Kode Etik DPRD 24. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 25. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 26. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 27. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 28. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 29. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (target capaian kinerja, kebutuhan dana) serta Prakiraan maju Tahun 2025 dapat di lihat secara rinci pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	A.4	Urusan Pemerintahan Daerah									
	A.4.02	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah									
Sekretariat DPRD	A.4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	331.598.554.270	APBD		4	326.508.161.341
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	DKI Jakarta	100	Persentase	189.651.528	APBD		100	523.707.406
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	11	Dokumen	147.000.000	APBD		11	400.877.063
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	3	Laporan	42.651.528	APBD		3	122.830.343
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	53.763.416.866	APBD		4	44.531.524.266
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	117	Orang/bulan	53.251.752.200	APBD		117	43.408.678.600
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	1	Dokumen	22.200.000	APBD		3	22.200.000



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DKI Jakarta	4	Dokumen	489.464.666	APBD		4	1.100.645.666
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	49.383.900	APBD		4	49.572.600
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKI Jakarta	2	Laporan	49.383.900	APBD		2	49.572.600
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	148.800.606	APBD		4	1.172.511.049
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKI Jakarta	1	Paket	148.800.606	APBD		1	1.172.511.049
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	29.465.721.816	APBD		4	22.739.566.413
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	637.352.565	APBD		1	846.511.797
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	4.552.363.993	APBD		1	5.686.308.865
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	472.674.597	APBD		1	815.352.058
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1	paket	4.035.148.128	APBD		1	2.907.693.500



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	1.569.586.417	APBD		1	2.774.729.071
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKI Jakarta	13	Dokumen	144.531.058	APBD		13	144.566.462
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	1.203.090.900	APBD		1	1.203.240.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	2	Laporan	83.471.600	APBD		2	32.662.800
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	12	Laporan	16.767.502.558	APBD		12	8.328.501.860
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran Yang Efisien	DKI Jakarta	4	Indeks	9.469.958.729	APBD		4	17.778.927.003
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	1.013.384.046	APBD		1	157.806.369
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	20	Unit	8.019.878.483	APBD		20	14.134.588.434
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	2	Unit	436.696.200	APBD		2	3.486.532.200
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	46.179.618.825	APBD		4	43.758.914.181



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	12	Laporan	423.109.662	APBD		12	480.580.060
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	12	Laporan	8.446.688.745	APBD		12	8.546.709.450
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12	Laporan	956.029.680	APBD		12	956.029.680
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12	Laporan	36.353.790.738	APBD		12	33.775.594.991
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	17.106.569.717	APBD		4	21.824.757.535
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	41	Unit	1.572.266.293	APBD		41	1.570.281.207
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DKI Jakarta	10	Unit	193.740.143	APBD		10	193.792.236
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	771	Unit	894.410.199	APBD		771	871.641.309
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	3	Unit	5.883.742.020	APBD		3	6.168.799.493



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DKI Jakarta	50	Unit	7.121.556.981	APBD		50	8.435.786.125
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	400	Unit	1.440.854.081	APBD		400	4.584.457.165
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan	DKI Jakarta	4	Indeks	2.817.305.503	APBD		4	2.455.783.387
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	DKI Jakarta	16	Laporan	2.817.305.503	APBD		16	2.455.783.387
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	DKI Jakarta	4	Indeks	168.783.570.020	APBD		4	168.783.570.020
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	DKI Jakarta	106	Orang/bulan	165.220.544.200	APBD		106	165.220.544.200
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	1.879.631.820	APBD		1	1.879.631.820
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	DKI Jakarta	106	Orang	1.683.394.000	APBD		106	1.683.394.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	DKI Jakarta	4	Indeks	3.624.556.760	APBD		4	2.889.327.481
Sekretariat DPRD	A.4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	3.624.556.760	APBD		1	2.889.327.481



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	DKI Jakarta	4	Indeks	370.635.956.300	APBD		4	496.420.444.568
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	DKI Jakarta	4	Nilai	1.056.225.184	APBD		4	7.376.425.532
			Jumlah Laporan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		1	Jumlah				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	DKI Jakarta	1	Dokumen	634.830.000	APBD		1	789.879.420
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	DKI Jakarta	1	Dokumen	135.737.184	APBD		1	6.082.546.112
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	DKI Jakarta	1	Dokumen	252.000.000	APBD		1	504.000.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	DKI Jakarta	1	Dokumen	33.658.000	APBD		-	-
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	DKI Jakarta	4	Nilai	5.699.737.500	APBD		4	13.677.751.848
			Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		1	Laporan				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	DKI Jakarta	1	Dokumen	7.215.000	APBD		1	7.215.000



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	DKI Jakarta	1	Dokumen	7.215.000	APBD		1	7.215.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	DKI Jakarta	13	Dokumen	5.674.485.000	APBD		13	13.635.122.148
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	DKI Jakarta	1	Dokumen	7.215.000	APBD		1	24.592.200
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	DKI Jakarta	2	Dokumen	3.607.500	APBD		2	3.607.500
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	DKI Jakarta	4	Nilai	9.923.940.000	APBD		4	10.921.379.000
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1	Jumlah				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	DKI Jakarta	12	Laporan	1.925.010.000	APBD		12	2.191.105.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	DKI Jakarta	12	Laporan	2.022.840.000	APBD		12	2.212.681.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	DKI Jakarta	12	Laporan	1.875.570.000	APBD		12	2.212.681.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	DKI Jakarta	12	Laporan	1.925.010.000	APBD		12	2.212.681.000



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	DKI Jakarta	12	Dokumen	2.175.510.000	APBD		12	2.092.231.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	DKI Jakarta	4	Nilai	180.075.862.293	APBD		4	225.733.514.440
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		1	Jumlah				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	DKI Jakarta	1	Dokumen	777.380.000	APBD		-	-
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	DKI Jakarta	6	Dokumen	6.803.606.400	APBD		6	12.216.084.008
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	DKI Jakarta	35	Dokumen	165.978.309.357	APBD		35	207.500.001.596
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	DKI Jakarta	30	Orang	4.595.500.000	APBD		30	4.234.230.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	DKI Jakarta	9	Orang	1.358.500.000	APBD		9	1.359.930.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	DKI Jakarta	1	Dokumen	562.566.536	APBD		1	423.268.836
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	DKI Jakarta	4	Nilai	100.867.906.140	APBD		4	148.770.058.213
			Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1	Laporan				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	DKI Jakarta	12	Laporan	4.465.827.060	APBD		12	3.875.377.060



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	DKI Jakarta	106	Dokumen	96.402.079.080	APBD		106	44.894.681.153
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	DKI Jakarta	4	Nilai	306.534.000	APBD		4	2.703.964.212
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		1	Jumlah				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	DKI Jakarta	12	Laporan	306.534.000	APBD		12	2.703.964.212
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	4	Nilai	3.497.710.496	APBD		4	1.785.072.400
			Persentase Kerjasama yang terfasilitasi		100	Persentase				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	DKI Jakarta	1	Dokumen	1.671.232.400	APBD		1	1.671.232.400
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	DKI Jakarta	1	Dokumen	1.826.478.096	APBD		1	113.840.000
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	DKI Jakarta	4	Nilai	69.208.040.687	APBD		4	85.452.278.923
			Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		1	Laporan				1	
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	DKI Jakarta	4	Dokumen	55.538.831.879	APBD		4	72.419.037.328



Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	DKI Jakarta	24	Dokumen	4.760.730.000	APBD		24	8.712.826.028
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	DKI Jakarta	1	Dokumen	3.782.491.308	APBD		1	2.400.847.567
Sekretariat DPRD	A.4.02.02.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	DKI Jakarta	4	Dokumen	5.125.987.500	APBD		4	1.919.568.000



PENUTUP



PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2024. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 dengan mempedomani isu-isu penting tahun 2024. Fungsi Rancangan Akhir Renja 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renja ini menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
3. Anggaran pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024;
4. Pada Pelaksanaan DPA Tahun 2024, akan dilakukan monitoring-evaluasi dan pelaporan secara periodik setiap bulannya. Hasil monitoring-evaluasi tersebut akan di gunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun berjalan maupun Renja tahun berikutnya.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Jakarta, Juni 2023

Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta



Augustinus, SE., MM
NIP 197908052008011010



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Desember 2022

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53/SE/2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah agar mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53/SE/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

A. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN AWAL, RANCANGAN DAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sedangkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tata cara penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:
 - a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - f. penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana angka 1 huruf b dimulai paling lambat awal bulan Desember sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah:
 - a. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Perangkat Daerah tahun 2022 dan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan/sub kegiatan alternatif dan/atau kegiatan/sub kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
 - b. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal Renja sebagaimana poin 3.a. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disempurnakan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 - c. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan untuk mempertajam target program, kegiatan dan sub kegiatan.

4. Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah mencakup beberapa hal sebagai berikut:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
5. Hasil perumusan dokumen Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat bagian sebagaimana berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022
Menyajikan data pengukuran kinerja dan analisa hasil evaluasi renja Perangkat Daerah, permasalahan dan tantangan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta form isian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V : Penutup

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (sampai dengan Tahun 2023)

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2022*			Target Program/Kegiatan/Sub kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan s/d tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/5)	12
	x										
	x x										
	x x	x x									
	x x	x x	x x					%		%	
	x x	x x	x x	x.x x				%			
	x x	x x	x x	x.x x				%			
	x x	x x	x x	x.x x				%			

*pada saat penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menggunakan data realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 pada triwulan III, pada saat penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah menggunakan realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s.d. triwulan IV.

Keterangan Isian Tabel 2.1:

- Kolom 1 : Diisi dengan Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019.
- Kolom 2 : Diisi dengan kode Tingkat/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kode Tingkat: Kode A untuk Provinsi Kode B untuk Kota/Kabupaten	Kode Urusan	Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub kegiatan
---	-------------	--	--------------	---------------	-------------------

- Kolom 3 : Diisi dengan uraian nama:
- urusan pemerintahan daerah;
 - bidang urusan pemerintahan daerah;
 - judul program yang direncanakan;
 - judul kegiatan yang direncanakan; dan
 - judul sub kegiatan yang direncanakan.

disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- Kolom 4 : Diisi jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan/sub kegiatan (*output*) sebagaimana terdapat evaluasi Renja Perangkat Daerah;

Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom 4 ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026;

Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai oleh suatu kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan/sub kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan/sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan/sub kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian

indikator keluaran dari setiap kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan;

- Kolom 5 : Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 sampai dengan akhir tahun RPD (tahun 2026);
Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah.
- Kolom 6 : Untuk baris program diisi dengan jumlah besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022); dan
Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2.
Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022).
- Kolom 7 : Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022) yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2 (2022);
Untuk baris program diisi dengan jumlah besaran realisasi kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022); dan
Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022).
Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022).
Pengisian menggunakan data realisasi kinerja pada triwulan III Tahun 2022.
- Kolom 8 : Kolom 8 = (kolom 7/Kolom 6) x 100%
Untuk baris program diisi dengan capaian (perbandingan antara realisasi dengan target kinerja) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022) dalam bentuk persentase;
Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022).
Untuk baris sub kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2022).
- Kolom 9 : Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1/2023);
Untuk baris program diisi dengan jumlah besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-1 (2023); dan
Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-1 (2023).
Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-1 (2023).

Kolom 10 : Kolom 10

Diisi dengan proyeksi jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan dalam RPD 2023-2026 yang sudah dilaksanakan dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-1 (2023).

Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian pada tahun berjalan.

Kolom 11 : Kolom 11 = (kolom 10/kolom 5) x 100%

Diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-1 (2023) dalam bentuk persentase;

Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian pada tahun berjalan.

Kolom 12 : Kolom 12 berisi keterangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Standar Pelayanan Minimal dan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Subbab ini disusun setelah forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah)

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD, sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (*Subbab ini disusun setelah Musrenbang Provinsi*)

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023* Nama Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

* Tahun Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun Rencana

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah/prioritas daerah,
- b. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs),
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,

- g. dan sebagainya.
- B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, dan anggaran indikatif Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Memuat Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, sebagai berikut:

Keterangan Tabel 4.1:

- Kolom 1 Diisi dengan Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
 Kolom 2 Diisi dengan kode urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah/program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan kodefikasi nomenklatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kode Tingkat: Kode A atau Kode B	Kode Urusan	Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub kegiatan
---	-------------	--	--------------	---------------	-------------------

- Kolom 3 Diisi dengan uraian nama urusan pemerintah daerah, uraian nama bidang urusan pemerintah daerah; sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan dan uraian judul sub kegiatan yang direncanakan.
- Kolom 4 Diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- Kolom 5 Diisi dengan lokasi kegiatan/sub kegiatan untuk tahun 2024.
- Kolom 6 Diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024.
- Kolom 7 Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/ sub kegiatan pada tahun 2024 dengan memperhatikan realisasi n-2 (2022) dan perkiraan realisasi tahun n-1 (2023) serta kemampuan keuangan daerah.
- Kolom 8 Diisi dengan keterangan sumber dana yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024, antara lain APBD/DAK/BLUD/Pinjaman/Lainnya.
- Kolom 9 Diisi dengan catatan atas program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan/sub kegiatan lanjutan, program/kegiatan/sub kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb.).
- Kolom 10 Diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan/sub kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.
- Kolom 11 Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/ sub kegiatan prakiraan maju pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

B. PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta guna menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diperlukan panduan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
16. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

17. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
18. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 63/SE/2019 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV;

B. KETENTUAN UMUM

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah agar memperhatikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait;
5. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berbasis kinerja dengan memperhatikan kausalitas kinerja, sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja harus memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound dan Challenging/Continuous Improvement*);
6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, tepat sasaran dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan/sub kegiatan secara optimal;
7. Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap rencana kegiatan/sub kegiatan, kinerja dan indikator kegiatan/sub kegiatan berikut atributnya;
8. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu dan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang terdiri atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilengkapi dengan kinerja, indikator kinerja serta satuan;
9. Penyusunan prioritas belanja daerah dibagi ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas ketiga, sebagaimana penghitungan kapasitas riil keuangan daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan ketentuan:
 - belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo.
 - belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah

daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet.

- b. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai pencapaian prioritas daerah, dengan mengacu pada RPD Tahun 2023-2026;
 - c. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai pencapaian prioritas Perangkat Daerah.
10. Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial agar memedomani ketentuan tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. belanja hibah berupa uang atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - c. pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
11. Penyusunan Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menindaklanjuti usulan aspirasi masyarakat yang berasal dari hasil penelaahan atas reses DPRD yang telah diparipurnakan, usulan hasil Rembuk RW yang telah diverifikasi dan divalidasi terakhir pada Musrenbang Kecamatan serta hasil penelaahan atas usulan langsung masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
12. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat.

C. KETENTUAN KHUSUS

1. Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum nomor 9 huruf a meliputi sub kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Belanja daerah yang bersifat wajib, meliputi:
 - 1) Sub kegiatan yang mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar.
 - 2) Sub kegiatan terkait Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS).
 - 3) Sub kegiatan terkait penyelenggaraan dapur umum dan penyediaan makanan bagi korban bencana.
 - 4) Sub kegiatan terkait penyediaan pakaian bagi korban bencana.
 - 5) Sub kegiatan terkait Peningkatan Layanan Umum Daerah.

- 6) Sub kegiatan terkait Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan.
- 7) Sub kegiatan terkait Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan diluar kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat, meliputi:

- 1) Sub kegiatan terkait Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah.
 - 2) Sub kegiatan terkait Penyediaan gaji dan tunjangan DPRD.
 - 3) Sub kegiatan terkait Penyediaan gaji dan tunjangan PNS; Penyediaan gaji dan tunjangan PPPK; Pemberian insentif bagi ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4) Sub kegiatan terkait Penyediaan BBM KDO; Penyediaan BBM KDO Khusus; Penyediaan BBM Peralatan Kerja Lainnya.
 - 5) Sub kegiatan terkait Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik; Pembayaran Biaya Jasa Penyambungan Air Bersih/Penyambungan dan Penambahan Daya Listrik; Pembayaran Rekening Listrik PJU.
 - 6) Subkegiatan terkait penyediaan listrik *traffic light*.
 - 7) Sub kegiatan terkait penyediaan jaringan intranet dan internet.
 - 8) Sub kegiatan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana mekanikal; Pemeliharaan sarana dan prasarana elektrik; Pemeliharaan sarana dan prasarana plumbing.
 - 9) Sub kegiatan terkait penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus dan penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus.
 - 10) Sub kegiatan terkait Petugas Mekanikal dan Elektrikal; Petugas Kebersihan Dalam Gedung; Petugas Kebersihan Luar Gedung; Petugas Keamanan; dan lainnya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, yang terkait dengan Pelayanan Kantor.
 - 11) Sub kegiatan terkait Penyediaan Makanan dan Obat Satwa Taman Margasatwa Ragunan;
 - 12) Subkegiatan terkait Penyediaan Makanan dan Obat Satwa di Kawasan Monumen Nasional.
2. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah agar melakukan penjabaran target kinerja kegiatan/sub kegiatan ke masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan mengacu pada target yang tercantum dalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah;
 3. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melengkapi *tagging* pada atribut sub kegiatan, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
 - b. Prioritas Daerah:
 - 1) Tujuan 1 Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan
 - a) 1-1 Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
 - b) 1-2 Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

- c) 1-3 Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
- d) 1-4 Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Kota
- 2) Tujuan 2 Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing disertai Penghidupan Layak, dan Pemerataan Kesejahteraan
 - a) 2-1 Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
 - b) 2-2 Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
 - c) 2-3 Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - d) 2-4 menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
- 3) Tujuan 3 Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan
 - a) 3-1 Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat
 - b) 3-2 Meningkatkan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
 - c) 3-3 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
 - d) 3-4 Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
- 4) Tujuan 4 Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas
 - a) 4-1 Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
 - b) 4-2 Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas
 - c) 4-3 Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
 - d) 4-4 Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
 - e) 4-5 Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur

c. Isu:

- 1) Penanggulangan banjir
- 2) Penanganan kemacetan
- 3) Penanganan sampah
- 4) Antisipasi dampak resesi ekonomi
- 5) Penanggulangan kemiskinan
- 6) Pencapaian tujuan SDG's
- 7) Pencegahan stunting
- 8) Mengakomodir Aspirasi Masyarakat hasil Reses DPRD
- 9) Mengakomodir Aspirasi Masyarakat hasil Rembuk RW
- 10) Mengakomodir Aspirasi Masyarakat hasil Usulan Langsung

- 11) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- 12) Responsif Gender
- 13) Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- 14) *Climate Budget Tagging* (CBT)
- 15) Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
- 16) Penyediaan Hunian Layak
- 17) Revitalisasi Pedestrian/Trotoar
- 18) Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe III
- 19) Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe IV

No	Isu	Definisi Operasional
1	Penanggulangan banjir	Sub kegiatan yang memiliki peran/ambil bagian dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta, khususnya yang menjadi komitmen dan rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor di Jabodetabekpunjur.
2	Penanganan kemacetan	Sub kegiatan yang mendukung penanggulangan kemacetan, diantaranya penyediaan angkutan umum, penertiban dan pengendalian lalu lintas, pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, yang dapat mendukung transportasi massal dan kelancaran lalu lintas antara lain seperti peningkatan kualitas jalan serta pemeliharaan kondisi jalan mantap.
3	Penanganan sampah	Sub kegiatan yang memiliki peran/ambil bagian dalam upaya penanganan sampah melalui pengurangan sampah di sumber, ITF, dan optimalisasi TPA Bantargebang.
4	Antisipasi dampak resesi ekonomi	Sub kegiatan yang mendukung upaya antisipasi dan meminimalisir dampak resesi ekonomi bagi masyarakat, seperti pemberian subsidi pangan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, peningkatan ekonomi kreatif, kewirausahaan dan ketenagakerjaan, serta investasi.
5	Penanggulangan kemiskinan	<p>Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.</p> <p>Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

No	Isu	Definisi Operasional
		<p>mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain:</p> <p>Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;</p> <p>Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;</p> <p>Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;</p> <p>Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.</p>
6	Pencapaian tujuan SDG's	<p>Sub kegiatan terkait dukungan terhadap pencapaian target SDG's.</p> <p>Terdapat 17 SDG's, sebagai berikut:</p> <p>tanpa kemiskinan;</p> <p>tanpa kelaparan;</p> <p>kehidupan sehat dan berkualitas;</p> <p>pendidikan berkualitas;</p> <p>kesetaraan gender;</p> <p>air bersih dan sanitasi layak;</p> <p>energi bersih dan terjangkau;</p> <p>pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;</p> <p>industri, inovasi dan infrastruktur;</p> <p>berkurangnya kesenjangan;</p> <p>kota dan pemukiman berkelanjutan;</p> <p>konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;</p> <p>penanganan perubahan iklim;</p> <p>ekosistem laut;</p> <p>ekosistem daratan;</p> <p>perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;</p> <p>kemitraan untuk mencapai tujuan.</p>
7	Pencegahan stunting	<p>sub kegiatan terkait pencegahan stunting sesuai Kepgub Nomor 578 Tahun 2021 tentang Tim</p>

No	Isu	Definisi Operasional
		Konvergensi Pengendalian Stunting di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8	Mengakomodir Aspirasi Masyarakat hasil Reses DPRD	sub kegiatan yang mengakomodir usulan asmas yang bersumber dari hasil reses DPRD
9	Mengakomodir Aspirasi Masyarakat hasil Rembuk RW	sub kegiatan yang mengakomodir usulan asmas yang bersumber dari hasil Rembuk RW
10	Mengakomodir Aspirasi Masyarakat hasil Usulan Langsung	sub kegiatan yang mengakomodir usulan asmas yang bersumber dari usulan langsung masyarakat
11	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	sub kegiatan terkait dengan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan yang inklusif disabilitas melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan
12	Responsif Gender	sub kegiatan yang terdapat isu gender di dalamnya (anak/perempuan/lansia/disabilitas/kelompok rentan lainnya), dalam rangka meningkatkan pembangunan kota yang responsif gender, terutama dalam pencapaian target Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 2,5% dari APBD (belanja modal dan belanja operasi di luar gaji, subsidi, bunga, dan hibah) yang ditetapkan Pemerintah Pusat bagi daerah di tahun 2023.
13	Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	sub kegiatan terkait penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui perwujudan peningkatan aktivitas fisik, peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat sesuai Pergub Nomor 161 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
14	<i>climate budget tagging</i> (CBT)	sub kegiatan, besaran dan realisasi anggaran publik yang dialokasikan pemerintah melalui APBD terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan dari dampak perubahan iklim.
15	pengelolaan air bersih dan sanitasi	sub kegiatan yang memiliki peran/ambil bagian dalam upaya penanganan sanitasi, diantaranya air bersih, air limbah dan persampahan di DKI Jakarta.
16	penyediaan hunian layak	sub kegiatan yang memiliki peran/ambil bagian dalam upaya penataan permukiman di kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak bagi warga baik rusunawa ataupun rusunami.

No	Isu	Definisi Operasional
17	revitalisasi pedestrian/trotoar	sub kegiatan yang memiliki peran/ambil bagian dalam upaya pembangunan/revitalisasi pedestrian di DKI Jakarta.
18	Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe III	sub kegiatan yang pengadaannya menggunakan metode Swakelola tipe III (dengan organisasi masyarakat)
19	Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe IV	sub kegiatan yang pengadaannya menggunakan metode Swakelola tipe IV (dengan kelompok masyarakat)

d. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1) SPM Pendidikan, meliputi:

- a) Pendidikan anak usia dini
- b) Pendidikan dasar
- c) Pendidikan kesetaraan
- d) Pendidikan khusus
- e) Pendidikan menengah

2) SPM Kesehatan

- a) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- b) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- c) Pelayanan kesehatan balita
- d) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- e) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- f) pelayanan kesehatan ibu hamil
- g) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- h) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
- i) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- j) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- k) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- l) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- m) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- n) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

3) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a) Pelayanan informasi rawan bencana
- b) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi
- c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- e) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- 4) SPM Perumahan Rakyat
 - a) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
 - b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
 - c) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
 - d) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
- 5) SPM Pekerjaan Umum
 - a) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
 - b) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - c) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
 - d) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- 6) SPM Sosial
 - a) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
 - b) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
 - c) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
 - d) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
 - e) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
 - f) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
 - g) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
 - h) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
 - i) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
 - j) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

Ketentuan pemberian *tagging* pada sub kegiatan:

- Pemberian/pemilihan *tagging* sub kegiatan agar dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan keterkaitan erat terhadap *tagging* yang dipilih, baik berupa sarana/prasarana utama seperti pembangunan dan pengadaan barang maupun sarana/prasarana pendukung seperti pemeliharaan dan petugas penunjang.
- Dalam 1 (satu) sub kegiatan, hanya dapat memilih 1 (satu) Kegiatan Prioritas, 1 (satu) Prioritas Daerah dan 1 (satu) atau beberapa isu serta 1 (satu) SPM terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pemangku SPM.
- Belanja daerah yang bersifat wajib pada prioritas pertama, seperti Biaya Operasional Pendidikan, Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS), Peningkatan Layanan BLUD, dapat memilih *tagging* Prioritas Daerah. Sedangkan prioritas ketiga tidak dapat memilih *tagging* Prioritas Daerah.

4. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar merencanakan secara cermat, hal-hal berikut:
 - a. penyediaan gaji dan tunjangan ASN agar memperhitungkan rencana kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan ASN serta pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya termasuk memperhitungkan accres maksimum 2,5% untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penganggaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN agar mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
 - c. penyediaan jasa telepon, air, listrik wajib memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan.
 - d. pemeliharaan peralatan kantor, seperti: AC sentral, lift, dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional (KDO) umum maupun khusus agar dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
 - e. pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah agar memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
 - f. pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan Sumber Daya Manusia, kecuali diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah yang membutuhkan dapat berkoordinasi dengan BPSDM untuk mendapat rekomendasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
 - g. pelaksanaan kegiatan yang bersifat keikutsertaan pameran/promosi/expo, pengadaan spanduk/baliho, selebaran/leaflet/brosur serta media informasi lainnya harus mempertimbangkan aspek selektif berdasarkan urgensi.
 - h. perencanaan anggaran perjalanan dinas dan pemberian izin perjalanan dinas harus mempertimbangkan aspek selektif berdasarkan urgensi, jumlah peserta maupun jumlah hari dan frekuensi perjalanan serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Anggaran perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri hanya boleh dialokasikan di Biro Kepala Daerah, Biro Kerja Sama Daerah dan Sekretariat DPRD, kecuali program kerja sama yang telah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) yang dikoordinasikan pada Perangkat Daerah tertentu.
 - i. melakukan inventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum bersertifikat serta melakukan pensertifikatan atas tanah yang belum bersertifikat tersebut dengan tetap mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan anggaran dengan memedomani Instruksi Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - j. pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi, pengadaan laptop/personal computer/server serta alat komunikasi (HT atau RIG) yang memerlukan frekuensi khusus agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mendapatkan rekomendasi dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.
 - k. pembangunan, rehab total, rehab berat dan rehab sedang gedung harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

- l. penyusunan analisis gender (*Gender Analysis Path*) dan analisis anggaran berbasis gender (*Gender Budget Statement*) untuk kegiatan strategis selambat-lambatnya sebelum tahap/fase RKA berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam rangka mencapai target Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 2,5 persen dari APBD (belanja modal dan belanja operasi di luar gaji, subsidi, bunga dan hibah) yang ditetapkan pemerintah pusat bagi daerah.
 - m. penyusunan program agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti melibatkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi pada perencanaan dalam rangka penyediaan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
5. Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilarang untuk:
- a. merencanakan kegiatan/sub kegiatan yang tidak mendukung indikator capaian program dan indikator sasaran pembangunan daerah.
 - b. mengalokasikan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, kecuali diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. menambah petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), kecuali diatur secara khusus dengan Peraturan Gubernur.
 - d. mengalokasikan anggaran honorarium, kecuali untuk:
 - tenaga ahli/instruktur/narasumber/pendamping kegiatan yang berasal dari ASN Kementerian/Lembaga atau non-ASN atau professional.
 - pegawai honorer/tidak tetap.
 - lembaga kemasyarakatan/petugas yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. mengalokasikan anggaran tambahan bagi guru negeri yang bekerja di luar waktu mengajar, kecuali diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. mengalokasikan biaya pengendalian teknis.
 - g. mengalokasikan biaya sewa Gedung/aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - h. mengalokasikan pengadaan peralatan elektronik, seperti: televisi, kamera, perangkat sound system yang tidak terkait dengan kinerja program/kegiatan.
 - i. mengalokasikan pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO) yang bersifat umum, kecuali pada Badan Pengelolaan Aset Daerah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas. Bagi Perangkat Daerah yang memerlukan KDO dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.
 - j. menganggarkan penyediaan internet pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 218/-1.713 Tahun 2018 tentang Penghentian Duplikasi Anggaran Penyediaan Internet yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran penyediaan internet dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Bagi Perangkat Daerah yang tidak terjangkau layanan internet/intranet dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mendapatkan rekomendasi (bagi Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah).
6. Bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan BLUD melakukan input rincian anggaran belanja dan pendapatan BLUD ke dalam sistem e-RBA pada laman rbablud.jakarta.go.id.

7. Dalam rangka implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
8. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar memetakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola Tipe III dan Tipe IV dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

C. TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tabel: Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

NO	URAIAN	TENGGAT WAKTU
I	Penyusunan Rancangan Awal Renja	Bulan Desember s.d. Minggu I Februari
	- Input Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu II Januari
	- Supervisi Rancangan Awal Renja secara berjenjang oleh Perangkat Daerah	Minggu III Januari s.d. Minggu II Februari
II	Penyusunan Rancangan Renja	Minggu II Februari s.d. Minggu I Maret
	- Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu II Februari
	- Forum Perangkat Daerah	Minggu III s.d. Minggu IV Februari
	- Penyempurnaan Rancangan Renja oleh Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Gubernur	Minggu II Februari s.d. Minggu I Maret
	- Penyampaian Rancangan Renja oleh Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi	Minggu I Maret
	- Verifikasi dokumen dan Supervisi Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda	Minggu II s.d. Minggu III Maret
III	Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Maret s.d. Minggu I Juli
	- Forum Lintas Sektor Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu III April
	- Forum Penajaman Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu I s.d. II Mei
	- Input dan Supervisi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu III Mei
	- Verifikasi Dokumen Rancangan Akhir Renja oleh Bappeda	Minggu II s.d. Minggu III Juli
IV	Penetapan Pergub Renja	Akhir Bulan Juli

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004